

Bulan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun:

2 0 2 4



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Media:	Radar Sampit	Halaman: 20
Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Elektronik	Palangka Post	Tabengan

Pj Bupati Serahkan LKPD kepada BPK RI



HUMAS UNTUK KALTENG POS

SERAHKAN LKPD: Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani menyerahkan LKPD tahun 2023 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng di Kantor BPK Kalteng, beberapa waktu lalu.

NANGA BULIK - Pemerintah Kabupaten Lamandau secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 (Unaudited) kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng.

Penyerahan LKPD itu dilakukan bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Ada sembilan pemerintah daerah (pemda) yang menyerahkan LKPD tersebut. Di antaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Seruyan, Barito Timur, dan Kabupaten Gunung Mas.

LKPD diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo mewakili Gubernur Sugianto Sabran kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng M Ali Asyhar di Kantor BPK Kalteng, belum lama ini.

Pj Bupati Lamandau Lilis Suriani menyampaikan, melalui penyerahan LKPD ini sekaligus sebagai bentuk komitmen dan transparan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. "Ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam menggunakan anggaran," kata Pj Bupati Lilis Suriani.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng M Ali Asyhar mengatakan, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK itu bertujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

Ditambahkannya, bahwa nantinya, kesimpulan atas opini yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern, akan menghasilkan pencapaian opini WTP juga mencerminkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah sudah baik. BPK berharap bahwa pencapaian tersebut juga diimbangi dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang makin meningkat. (lan/ens)